

Jakarta, 30 Agustus 2019

Nomor : 2.01/09/JPTPRATAMA/KEMPAR/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Kementerian Pariwisata

Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama LPNK
2. Sekretaris Daerah Provinsi di Indonesia

di -
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata, akan diselenggarakan seleksi terbuka dan kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata, yaitu.

1. Asisten Deputy Manajemen Strategis
2. Asisten Deputy Pengembangan Destinasi Regional II
3. Asisten Deputy Pengembangan Pemasaran I Regional II

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk kiranya dapat menginformasikan pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pariwisata sebagaimana dimaksud, kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara. **Pendaftaran dimulai tanggal 30 Agustus - 13 September 2019**, informasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan, dan tahapan Seleksi Terbuka dapat dilihat di www.kemenpar.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Kementerian



Tembusan Yth:

1. Menteri Pariwisata (sebagai laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Ketua Tim Pansel JPT Madya dan Pratama Kemenpar 2019.

Lampiran I : Daftar Kementerian/Lembaga Negara
Nomor : 2.01/09/JPTPRATAMA/KEMPAR/2019
Tanggal : 30 Agustus 2019

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
3. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
- ④. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Sekretariat Kabinet;
2. Kementerian Sekretariat Negara;
3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Agama;
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kementerian Keuangan;
13. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;
14. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
15. Kementerian Kesehatan;
16. Kementerian Sosial;
17. Kementerian Ketenagakerjaan;
18. Kementerian Perindustrian;
19. Kementerian Perdagangan;
20. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian Perhubungan;
23. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
24. Kementerian Pertanian;
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
27. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB;
29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
32. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
33. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga;

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Arsip Nasional;
2. Badan Ekonomi Kreatif;
3. Badan Informasi Geospasial;
4. Badan Intelijen Negara;
5. Badan Keamanan Laut;
6. Badan Kepegawaian Negara;
7. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Badan Narkotika Nasional;
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
14. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
18. Badan Pusat Statistik;
19. Badan SAR Nasional;
20. Badan Standarisasi Nasional;
21. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
23. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
24. Lembaga Ketahanan Nasional;
25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
26. Lembaga Sandi Negara;
27. Lembaga Administrasi Negara;
28. Perpustakaan Nasional

D. Sekretariat Daerah Provinsi

1. Sekretariat Daerah Provinsi Aceh;
2. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
4. Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
5. Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
6. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
7. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
8. Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu;
9. Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
10. Sekretariat Daerah Provinsi Bangka Belitung;
11. Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
13. Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
14. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Sekretariat Daerah Provinsi Bali;
18. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
21. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
24. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
25. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

26. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
27. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
28. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
29. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
30. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
31. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku;
32. Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
33. Sekretariat Daerah Provinsi Papua;
34. Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.